

Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali

I Komang Oka Artana Yasa^{*)}

Sudarsana Arka

Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan dari pembangunan. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan. Walaupun kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali meningkat setiap tahunnya, namun peningkatan cenderung rendah dan masih terjadinya disparitas pendapatan antardaerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui disparitas pendapatan antardaerah Provinsi Bali dan hubungan antara pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan data sekunder, selanjutnya dianalisis menggunakan analisis Indeks Williamson dan analisis jalur. Hasil analisis menunjukkan disparitas pendapatan antardaerah Provinsi Bali tahun 2001-2012 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,29 artinya tingkat disparitas tergolong rendah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antardaerah, namun berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Disparitas pendapatan antardaerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas pendapatan antardaerah. Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memperhatikan pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan agar tercipta suatu kesejahteraan masyarakat.

Kata kunci: pertumbuhan ekonomi, disparitas pendapatan antardaerah, kesejahteraan masyarakat

The Effect Of Economic Growth And Regional Income Diparities On Public Welfare

ABSTRACT

Public welfare is goal of development. Its can be seen from increasing economic growth and inequality in income distribution. Although welfare of Bali is increasing every year, but increase is still relatively low and still occur regional income disparities. This study aims to determine regional income disparities of Bali and the relationship between economic growth, regional income disparities of public welfare. This study uses secondary data was analyzed using analysis of Index Williamson and path analysis. The analysis shows income disparity between regions of Bali Province in 2001-2012 decreased by an average value of 0.29 means that relatively low levels of disparity. Economic growth in a negative and significant impact on regional income disparities, but a positive and significant impact on public welfare. Regional income disparities in a negative and significant impact on public welfare. Economic growth was indirect effect on public welfare through regional income disparities. Local governments in development policy to pay attention to economic growth and income distribution in order to create a public welfare.

Keyword: economic growth, regional income disparities, public welfare

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya untuk meningkatkan pendapatan riil perkapita dalam jangka panjang dan diikuti oleh perbaikan sistem

kelembagaan. Tujuan utama dari pembangunan adalah menciptakan kesejahteraan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan meratanya distribusi pendapatan (Arsyad, 2010:11). Keadaan

^{*)} E-mail : okaartanayasa@gmail.com

Tabel 1. IPM dan Pertumbuhan IPM Provinsi Bali Tahun 2001-2012

Tahun	IPM	Pertumbuhan (%)
2001	65,57	-
2002	65,50	-0,11
2003	67,10	2,44
2004	69,13	3,03
2005	69,78	0,94
2006	70,07	0,42
2007	70,53	0,66
2008	70,98	0,64
2009	71,52	0,76
2010	72,28	1,06
2011	72,84	0,77
2012	73,49	0,89

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2013 (data diolah)

geografis Indonesia yang berupa kepulauan menjadi salah satu hambatan dalam melaksanakan pemerataan pembangunan pada setiap daerah. Kebijakan otonomi daerah merupakan sarana untuk menciptakan pembangunan yang lebih baik, karena kebijakan ini akan mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, dimana pemerintah daerah akan lebih efisien dalam pengelolaan sumber daya yang tersedia pada masing-masing daerah dan penyediaan barang-barang publik untuk memperlancar kegiatan perekonomian (Oates, 1993).

Pembangunan dalam lingkup daerah disamping meningkatkan PDRB dan laju pertumbuhan ekonomi daerah, juga perlu memperhatikan pembangunan manusia. Menurut Santika (2014) tingkat pembangunan manusia dapat mempengaruhi kemampuan penduduk dalam mengelola berbagai sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Ukuran perkembangan pembangunan manusia menggunakan indikator komposit yaitu IPM, yang tersusun atas indeks kesehatan, indeks pendidikan, dan indeks standar hidup layak (BPS, 2013). Tabel 1 menunjukkan angka IPM Provinsi Bali dan pertumbuhannya dalam kurun waktu 2001-2012.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa, Provinsi Bali merupakan salah satu daerah yang berhasil melakukan peningkatan IPM. Meskipun demikian pertumbuhan IPM masih mengalami fluktuasi selama periode 2001-2012, rata-rata pertumbuhan IPM cenderung rendah atau masih di bawah angka 1%, maka dari itu pemerintah Provinsi Bali masih perlu melakukan pengembangan mutu modal manusia baik dalam hal kesehatan, pendidikan, maupun pendapatan masyarakat secara berkelanjutan agar pertumbuhan IPM mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Kuncoro (2004:127) menyatakan pembangunan dalam lingkup negara secara spasial tidak selalu

merata. Terdapat daerah dengan pertumbuhan yang cepat dan daerah dengan pertumbuhan yang lambat. Pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang perlu diperhatikan dalam pembangunan daerah karena Alesina dan Rodric (dalam Patta, 2012) mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan.

Provinsi Bali merupakan daerah yang terkenal sebagai daerah tujuan pariwisata, sektor pariwisata menjadi tulang punggung pertumbuhan ekonomi di Bali. Meskipun Bali dikenal sebagai daerah pariwisata, namun dari 9 wilayah kabupaten dan kota hanya beberapa daerah saja yang menikmati hasil dari pariwisata Bali. Kecenderungan nilai PDRB tertinggi masih didominasi oleh Kabupaten Badung dan nilai terendah didominasi oleh Kabupaten Bangli. Terdapat selisih yang cukup besar antara nilai PDRB tertinggi dengan nilai PDRB terendah, hal ini menunjukkan terjadinya ketidakmerataan distribusi pendapatan yang cukup tinggi antara kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tambunan (dalam Savitri, 2008) menyatakan disparitas distribusi investasi antardaerah dapat juga dianggap sebagai salah satu faktor utama yang menyebabkan terjadinya disparitas pendapatan antardaerah. Investor cenderung melakukan investasi pada daerah-daerah maju, karena memudahkan akses pada fasilitas-fasilitas tertentu.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut Kuznets (dalam Daryanto, 2012) mengatakan bahwa dalam jangka pendek pertumbuhan pendapatan perkapita dan ketimpangan mempunyai korelasi positif, namun korelasi tersebut menjadi negatif dalam jangka panjang. Menurut Lay (dalam Rastiwa, 2013) indikator ekonomi kesenjangan wilayah adalah tingkat kesejahteraan penduduk, kualitas pendidikan, pola penyebaran dan konsentrasi investasi serta ketersediaan sarana prasarana. Pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan merupakan hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan suatu daerah. Penentuan kebijakan-kebijakan dalam proses pembangunan pada dasarnya bertujuan untuk mencapai suatu kesejahteraan yang adil dan makmur dalam masyarakat.

Menurut Mirza (2012) pertumbuhan ekonomimempunyai hubungan positif terhadap IPM, yang berarti pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi maka akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Tetapi kesenjangan ekonomi antardaerah berpengaruh yang negatif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, dengan

melihat adanya keterkaitan antara Pertumbuhan Ekonomi, Disparitas Pendapatan Antardaerah, dan Kesejahteraan Masyarakat sesuai dengan apa yang dinyatakan pada penelitian sebelumnya, maka dari itu penelitian ini berusaha mengetahui “Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Disparitas Pendapatan Antardaerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Bali selama kurun waktu 2001-2012”, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (i) Bagaimanakah tingkat Disparitas Pendapatan yang terjadi antar-kabupaten/kota di Provinsi Bali tahun 2001-2012?; (ii) Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Disparitas Antardaerah?; (iii) Bagaimanakah pengaruh Disparitas Pendapatan Antardaerah terhadap Kesejahteraan Masyarakat?; (iv) Bagaimanakah pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kesejahteraan Masyarakat?; dan (v) Apakah Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap Kesejahteraan Masyarakat melalui Disparitas Pendapatan Antardaerah?

Kesejahteraan Masyarakat

Grubel (1998) menyatakan bahwa statistik pendapatan nasional yang mengukur kesejahteraan manusia tidaklah sempurna, hal itu telah mendorong *United Nations Development Program (UNDP)* untuk mempublikasikan setiap tahunnya indikator kesejahteraan sosial untuk 175 negara. Indikator tersebut dikenal dengan *Human Development Index (HDI)* atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM). *Human Development Index (HDI)* merupakan perangkat yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan antarnegara ataupun antardaerah (Todaro, 2009:57). *HDI* dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$HDI = \frac{1}{3} (X_1 + X_2 + X_3) \quad (1)$$

Keterangan:

- X_1 : indeks harapan hidup kelahiran
 X_2 : indeks pendidikan
 X_3 : indeks standar hidup layak

IPM telah memainkan dua peran kunci dalam bidang pembangunan ekonomi yang diterapkan: (1) sebagai alat untuk mempopulerkan pembangunan manusia sebagai pemahaman baru tentang kesejahteraan, dan (2) sebagai alternatif untuk PDB perkapita sebagai cara untuk mengukur tingkat pembangunan untuk perbandingan antarnegara dan antarwaktu (Elizabeth, 2007). Aspek pertumbuhan ekonomi dan pemerataan distribusi pendapatan merupakan hal yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peertumbuhan ekonomi yangmeningkat dan distribusi

pendapatan yang merata akan berdampak pada membaiknya tingkat kesehatan dan pendidikan serta akan memperbaiki tingkat produktifitas tenaga kerja.

Kesenjangan Distribusi Pendapatan

Thee Kian Wie (dalam Hartono, 2008) menyatakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan dari sudut pandangan ekonomi dibagi menjadi:

- 1) Ketimpangan pembangian pendapatan antar-golongan penerima pendapatan (*size distribution oncome*).
- 2) Ketimpangan pembagian pendapatan antardaerah perkotaan dan daerah pedesaan (*urban-rural income disparities*).
- 3) Ketimpangan pembagian pendapatan antardaerah (*regional income disparities*)

Menurut Basri (dalam Sasana, 2009) distribusi pendapatan nasional menunjukkan merata atau tidaknya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya. Misalnya untuk kasus di Indonesia, menurut Sakamoto (2006) distribusi pendapatan antarprovinsi atau antar-kabupaten/kota menunjukkan kesenjangan pendapatan yang cukup tinggi. Faktor-faktor yang diduga menyebabkan terjadinya perbedaan pendapatan antarwilayah ini adalah kepemilikan sumber daya alam, ketersediaan infrastruktur, dan kualitas sumber daya manusia (Arsyad, 2010:288). Sedangkan menurut Fleisher (2009) faktor penentu kesenjangan antarwilayah meliputi investasi modal fisik, modal manusia, dan modal infrastruktur. Salah satu indikator yang biasa dan dianggap cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan/disparitas pendapatan antardaerah adalah indeks ketimpangan daerah yang dikemukakan *Jeffrey G. Williamson* (Arsyad, 2010:294).

Penelitian Simon Kuznet menemukan sebuah pola yang berbentuk U terbalik terkait dengan kesenjangan antarwilayah. Pola tersebut menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, proses pertumbuhan diikuti oleh semakin memburuknya distribusi pendapatan dan setelah mencapai titik tertentu, pembangunan akan diikuti oleh membaiknya pemerataan (Hartono, 2008)

Teori neoklasik menyatakan bahwa distribusi faktor produksi, seperti modal dan tenaga kerja pada tahap awal pembangunan yang kurang lancar, menyebabkanterkonsentrasi modal dan tenaga kerja ahli pada daerah tertentu sehingga kesenjangan pembangunan cenderung meningkat. Akan tetapi apabila proses pembangunan berlangsung secara terus-menerus atauberkelanjutan, sehingga semakin membaiknya prasarana dan fasilitas komunikasi, maka distribusi modal dan tenaga kerja tersebut

akan semakin lancar. Dengan demikian, kesenjangan pembangunan regional akan semakin berkurang. (Sjafrizal, 2008:104).

Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi

Pertumbuhan dan pembangunan ekonomi merupakan masalah makroekonomi dalam jangka panjang. Banyak orang sering keliru dalam mendefinisikan istilah pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, keduanya memang menerangkan mengenai perkembangan perekonomian namun memiliki makna yang berbeda (Sukirno, 2006:423). Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat, sedangkan pembangunan mempunyai arti yang lebih luas, mencakup peningkatan pengurangan ketidakmerataan distribusi pendapatan dan pengentasan kemiskinan, demi menciptakan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dapat didefinisikan sebagai kenaikan pendapatan perkapita dan produk nasional. Untuk meningkatkan produk nasional jumlah investasi harus lebih besar dari jumlah yang diperlukan untuk menggantikan penyusutan modal. Oleh karena itu, jumlah tabungan dan investasi memainkan peran penting dalam proses pertumbuhan ekonomi (Gallo, 2002). Todaro (2000:111) menyatakan ada tiga faktor utama dalam pertumbuhan ekonomi pada suatu negara. Ketiga faktor tersebut adalah:

- 1) Akumulasi modal, yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru yang ditanamkan pada tanah, peralatan fisik, dan modal atau sumber daya manusia.
- 2) Pertumbuhan penduduk, yang pada akhirnya akan memperbanyak jumlah angkatan kerja.
- 3) Kemajuan teknologi, berupa cara baru atau perbaikan cara-cara lama dalam menangani pekerjaan-pekerjaan.

Salah satu alat untuk mengukur laju pertumbuhan ekonomi adalah Produk Domestik Bruto atau Produk Domestik Regional Bruto (Pambudi, 2013). Laju pertumbuhan ekonomi diformulasikan sebagai berikut (Arsyad, 2010:24):

$$Gt = \frac{Y_{rt} - Y_{rt-1}}{Y_{rt-1}} \times 100\% \quad (2)$$

Keterangan:

Gt = Tingkat pertumbuhan ekonomi (%)

Y_{rt} = Produk Domestik Regional Bruto riil tahun t

Y_{rt-1} = Produk Domestik Regional Bruto riil tahun sebelumnya

Hubungan Disparitas Pendapatan Antardaerah dengan Kesejahteraan Masyarakat

Kesenjangan pembangunan antarwilayah merupakan suatu hal yang umum terjadi dalam pembangunan ekonomi suatu daerah. Kesenjangan ini pada dasarnya disebabkan oleh adanya perbedaan kandungan sumber daya alam dan perbedaan kondisi demografis yang terdapat pada masing-masing wilayah. Akibat dari perbedaan ini, kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda. Terjadinya kesenjangan/disparitas antarwilayah ini membawa implikasi terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat antarwilayah. Alesina dan Rodric (dalam Patta, 2012) mengemukakan bahwa ketidakmerataan distribusi pendapatan akan berpengaruh buruk terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemudian kesejahteraan masyarakat suatu wilayah pun akan mengalami penurunan. Sedangkan Patta (2012) dalam penelitiannya menemukan adanya hubungan negatif antara distribusi pendapatan dengan indeks pembangunan manusia di Sulawesi Selatan.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Disparitas Pendapatan Antardaerah

Kuznet menyatakan bahwa hubungan antara pertumbuhan dengan kesenjangan seperti *U-shaped* terbalik, yaitu dalam jangka pendek ada korelasi positif, namun dalam jangka panjang hubungan tersebut menjadi negatif. Artinya dalam tahap awal pembangunan tingkat ketimpangan akan semakin besar sampai pada tingkat tertentu dan selanjutnya tingkat ketimpangan itu akan semakin menurun (Daryanto, 2012). Menurut Tabassum (2007) dalam penelitiannya menyatakan bahwa belanja pemerintah yang digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi mampu mengurangi kesenjangan pembangunan antardaerah, dengan kata lain pemerataan akan dapat dicapai jika pertumbuhan ekonomi setiap daerah mengalami peningkatan secara bertahap.

Karl Mark (dalam Prapti, 2006) menyatakan bahwa pada tahap awal pembangunan, akan terjadinya peningkatan permintaan tenaga kerja. Kenaikan permintaan tenaga kerja ini akan diikuti oleh naiknya tingkat upah selanjutnya berpengaruh terhadap kenaikan resiko kapital terhadap tenaga kerja sehingga pada akhirnya terjadi penurunan kembali terhadap permintaan tenaga kerja. Akibatnya timbul masalah pengangguran dan kesenjangan pendapatan. Dapat disimpulkan bahwa pembangunan ekonomi cenderung mengurangi masalah kemiskinan dan kesenjangan distribusi pendapatan hanya pada

tahap awal pembangunan, kemudian pada tahap selanjutnya akan terjadi sebaliknya.

Hubungan Pertumbuhan Ekonomi dengan Kesejahteraan Masyarakat

Pada tingkat makro, distribusi peningkatan pendapatan dari pertumbuhan ekonomi juga akan memiliki dampak yang kuat pada pembangunan manusia dan pertumbuhan ekonomi yang manfaatnya diarahkan lebih ke masyarakat miskin akan memiliki dampak yang lebih besar pada pembangunan manusia (Ranis, 2004). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, dengan peningkatan pendapatan yang terjadi, maka kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya menjadi lebih baik, hal ini menunjukkan bahwa kesejahteraan dalam bentuk pendapatan masyarakat mulai meningkat. UNDP juga menyatakan bahwa sampai akhir tahun 1990-an, pembangunan manusia di Indonesia ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau Produk Domestik Bruto (PDB). Pertumbuhan PDB akan mendorong masyarakat untuk mendapatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang lebih baik (Lilis dan Yohana, 2012).

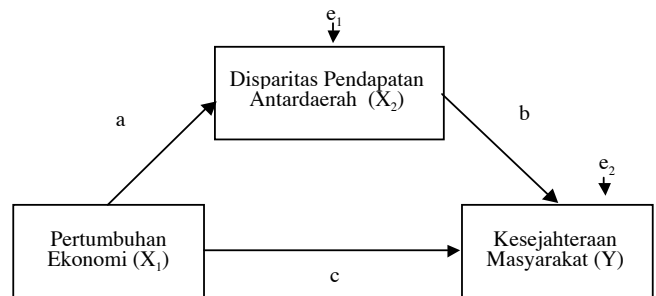
DATA DAN METODOLOGI

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di Provinsi Bali dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Bali. Data sekunder tersebut berupa data produk domestik regional bruto (PDRB) kabupaten/kota di Provinsi Bali, pertumbuhan ekonomi Provinsi Bali, dan kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.

Teknik Analisis Data

Disparitas pendapatan antardaerah diukur menggunakan analisis Indeks Williamson yang dikenalkan oleh Jeffrey G. Williamson (Sjafrizal, 2008:107). Hasil analisis ketimpangan berdasarkan Indeks Williamson dapat dikelompokkan ke dalam kategori wilayah dengan tingkat ketimpangan rendah dengan nilai Indeks Williamson < 0,3, tingkat ketimpangan sedang dengan nilai Indeks Williamson antara 0,3-0,7 dan tingkat ketimpangan tinggi dengan nilai Indeks Williamson > 0,7 (BAPENAS, 2013). Indeks ketimpangan regional ini diformulasikan sebagai berikut (Arsyad, 2010:294):

Gambar 1. Diagram Analisis Jalur Penelitian



Sumber: desain penelitian

$$IW = \frac{\sqrt{\sum_{i=1}^n (Y_i - Y)^2 (f_i/n)}}{Y} \tag{3}$$

Keterangan:

- IW : Indeks Williamson
- Y_i : Pendapatan per kapita kabupaten/kota
- Y : Pendapatan per kapita Provinsi Bali
- f_i : Jumlah penduduk kabupaten/kota
- n : jumlah penduduk Provinsi Bali

Metode selanjutnya menggunakan analisis jalur (*Path Analysis*). Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda, untuk menaksir hubungan kausalitas antar variabel yang berjenjang berdasarkan teori (Utama, 2012). Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan langsung variabel eksogen terhadap variabel endogen dan hubungan tidak langsung yang melalui variabel intervening. Hubungan variabel ditunjukkan pada Gambar 1.

Berdasarkan pada Gambar 1 dapat dibuat persamaan struktural sebagai berikut:

$$X_2 = \beta_1 X_1 + e_1 \tag{4}$$

$$Y = \beta_2 X_1 + \beta_3 X_2 + e_2 \tag{5}$$

Keterangan:

- Y = Kesejahteraan Masyarakat
- X₁ = Pertumbuhan Ekonomi
- X₂ = Disparitas Pendapatan Antardaerah
- β₁, β₂, β₃ = Koefisien regresi untuk masing-masing variabel X

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali

Berdasarkan harga konstan pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota di Provinsi Bali selama 2001-2012 relatif berfluktuasi, pada tahun 2001 berkisar antara 2,86-5,84%, pada tahun 2012 pertumbuhannya berkisar antara 5,73-7,30%.

Pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota cenderung mengalami peningkatan, pertumbuhan ekonomi dengan nilai tertinggi didominasi oleh Kabupaten Badung. Ini memperlihatkan bahwa kondisi perekonomian Bali sangat tergantung pada

Tabel 2. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Atas Dasar Harga Konstan Selama Periode Tahun 2001-2012

Kabupaten/ Kota	Tahun											
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jembrana	3,16	3,06	3,58	4,86	5,00	4,52	5,10	5,05	4,82	4,57	5,61	5,90
Tabanan	3,08	4,54	4,91	4,73	5,96	5,25	5,76	5,22	5,44	5,68	5,82	5,91
Badung	5,50	3,90	3,00	5,78	5,61	5,03	6,85	6,91	6,39	6,48	6,69	7,30
Gianyar	4,46	3,48	3,33	4,95	5,47	5,20	5,89	5,90	5,93	6,04	6,76	6,79
Klungkung	5,84	5,53	3,10	4,67	5,41	5,03	5,54	5,07	4,92	5,43	5,81	6,03
Bangli	3,37	3,03	3,38	4,03	4,46	4,25	4,48	4,02	5,71	4,97	5,84	5,99
Karangasem	2,86	3,09	4,05	4,49	5,13	4,80	5,20	5,07	5,01	5,09	5,19	5,73
Buleleng	4,08	4,06	4,84	4,98	5,60	5,35	5,82	5,84	6,10	5,85	6,11	6,52
Denpasar	5,12	5,03	5,31	5,83	6,05	5,88	6,60	6,83	6,53	6,57	6,77	7,18
Bali	3.53	3.03	3.58	4.62	5.56	5.28	5.92	5.97	5.33	5.83	6.49	6.65

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2013 (data diolah)

Tabel 3. Indeks Williamson Provinsi Bali Tahun 2001-2012

Tahun	Nilai	Kriteria
2001	0,35	Sedang
2002	0,34	Sedang
2003	0,32	Sedang
2004	0,31	Sedang
2005	0,30	Sedang
2006	0,29	Rendah
2007	0,28	Rendah
2008	0,27	Rendah
2009	0,26	Rendah
2010	0,26	Rendah
2011	0,25	Rendah
2012	0,25	Rendah

Sumber: Hasil olah data, 2014

perekonomian Kabupaten Badung mengingat sektor pariwisata yang memberikan sumbangan tertinggi kepada perekonomian Bali sebagian besar berlokasi di Kabupaten Badung. Sedangkan pertumbuhan dengan nilai terendah didominasi oleh Kabupaten Bangli.

Kondisi perekonomian Provinsi Bali tahun 2012 dapat dikatakan cukup baik. Hal ini ditunjukkan dengan nilai pertumbuhan ekonomi secara *year on year* sebesar 6,65%, dimana target pemerintah Provinsi Bali pada tahun 2012 mencapai 6,57%. Hal ini dikarenakan tingginya pertumbuhan pada komponen pembentukan modal tetap domestik bruto atau investasi fisik yang terjadi di Provinsi Bali. Tingginya pertumbuhan komponen tersebut tentunya tidak terlepas dari pembangunan sarana dan prasarana publik yang menunjang kegiatan perekonomian Bali seperti adanya perluasan Bandara Ngurah Rai, pembangunan jalan tol di atas perairan, dan pembangunan sejumlah sarana infrastruktur lainnya.

Disparitas Pendapatan Antardaerah Provinsi Bali

Hasil perhitungan dengan menggunakan Indeks Williamson menunjukkan terjadinya disparitas atau kesenjangan pendapatan antar-kabupaten/kota Provinsi Bali yang ditunjukkan oleh nilai Indeks Williamson yang lebih besar dari 0. Meskipun masih terjadi kesenjangan pendapatan antar-kabupaten/kota di Provinsi Bali namun nilai Indeks Williamson memperlihatkan kecenderungan yang semakin menurun dari tahun 2001-2012.

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui besarnya Indeks Williamson pada tahun 2001 mencapai nilai 0,35 dan terus mengalami penurunan sampai tahun 2012 yang menjadi nilai 0,24. Secara rata-rata kesenjangan tergolong dalam kategori rendah, ini ditunjukkan oleh nilai rata-rata sebesar 0,29.

Diperkirakan penurunan disparitas pendapatan antardaerah ini salah satunya disebabkan oleh pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, otonomi daerah dan desentralisasi fiskal memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerataan dan kesejahteraan, karena kebijakan ditentukan sesuai dengan potensi setiap daerah dan lebih mampu memperhitungkan kondisi regional dalam penyediaan barang-barang, seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan (Thornton, 2006). Menurut Pose (2007) menyatakan bahwa desentralisasi fiskal memberikan perubahan yang signifikan terhadap pemerataan dan kesejahteraan. Hal ini dikarenakan pemerintah daerah (dengan asumsi lebih dekat dengan rakyat) lebih cakap dalam membuat kebijakan yang menentukan barang publik yang dibutuhkan di daerahnya. Dengan demikian pemerintah daerah menghasilkan fungsi alokasi yang lebih efisien.

Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota mulai membaik juga merupakan faktor penyebab penurunan Indeks Williamson. Rata-rata pertumbuhan ekonomi masing-masing kabupaten/kota mengalami peningkatan dalam periode 2001-2012. Pada tahun 2001 pertumbuhan berkisar pada angka 2,86-5,84%, hal ini menunjukkan terjadinya jarak yang cukup besar antara daerah dengan pertumbuhan ekonomi yang paling rendah dengan daerah yang memiliki pertumbuhan ekonomi paling tinggi. Akan tetapi pada tahun 2012 pertumbuhan ekonomi pada masing-masing kabupaten/kota sudah mencapai angka di atas 5,50% yang berkisar pada angka 5,90-7,30. Selisih antara daerah dengan pertumbuhan ekonomi paling rendah dan daerah dengan pertumbuhan paling tinggi sudah mulai berkurang. Hal ini membuktikan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota telah berhasil menciptakan pertumbuhan yang tinggi melalui pemanfaatan sektor-sektor ekonomi pada setiap daerah. Melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi yang secara serempak dilaksanakan pada setiap daerah ini diharapkan mampu menciptakan pemerataan distribusi pendapatan sehingga dapat mengurangi kesenjangan pendapatan yang terjadi antardaerah di Provinsi Bali.

Hasil Pengujian Analisis Jalur (Path Analysis)

Koefisien jalur dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan struktural sebagai berikut ini. *Pertama*, Persamaan Struktural 1, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan antardaerah adalah $X_2 = -0,924X_1 + e_1$. *Kedua*, Persamaan Struktural 2, yaitu pengaruh pertumbuhan ekonomi dan disparitas pendapatan antardaerah terhadap kesejahteraan masyarakat adalah $Y = 0,340X_1 - 0,668X_2 + e_2$. Untuk mengetahui nilai e_1 dan e_2 , dihitung menggunakan rumus:

$$e_1 = \sqrt{1 - 0,853} = 0,383$$

$$e_2 = \sqrt{1 - 0,983} = 0,130$$

Untuk memeriksa validitas model menggunakan koefisien determinasi total, hasilnya sebagai berikut:

$$R^2_m = 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2$$

$$R^2_m = 1 - (0,401)^2 - (0,130)^2$$

$$R^2_m = 0,997$$

Hasil perhitungan koefisien determinasi total sebesar 0,997, artinya informasi yang terkandung dalam data sebesar 99,7% dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sisanya yaitu 0,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dijelaskan dalam model.

1) Pengaruh Langsung

Nilai *standardized coefficient beta* pertumbuhan ekonomi terhadap disparitas pendapatan antardaerah-

Tabel 4. Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	t hitung	P. Value	Keterangan
X1 → X2	-0,924	0,003	-7,631	0,000	Signifikan
X1 → Y	0,340	0,253	2,996	0,015	Signifikan
X2 → Y	-0,668	8,801	-5,881	0,000	Signifikan

Sumber: Hasil olah data, 2013

sebesar -0,924 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antardaerah. Hasil ini sejalan dengan penelitian Qiao, dkk (2007) yang menemukan adanya *trade-off* atau hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan regional. Pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah di Provinsi Bali telah mampu mengurangi kesenjangan pendapatan antardaerah yang dilihat dari penurunan angka Indeks Williamson pada periode penelitian 2001-2012. Setiap daerah kabupaten/kota di Provinsi Bali telah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi hal ini dapat dilihat pada peningkatan PDRB masing-masing kabupaten/kota setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan mulai terciptanya pemerataan pembangunan pada setiap daerah di Provinsi Bali.

Nilai *standardized coefficient beta* disparitas pendapatan antardaerah sebesar -0,668 dan nilai probabilitas sebesar 0,000 < 0,05 ini berarti disparitas pendapatan antardaerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil ini sejalan penelitian Abdel-Rahman dan Ping Wang (1996), yang menemukan bahwa pelebaran ketimpangan antarwilayah akan menyebabkan menurunnya kesejahteraan sosial. Menurunnya angka disparitas pendapatan antardaerah akan berdampak pada terciptanya pemerataan pembangunan pada setiap kabupaten/kota di Provinsi Bali dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat pun akan meningkat.

Nilai *standardized coefficient beta* pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 0,340 dan nilai probabilitas sebesar 0,015 < 0,05 ini berarti pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Mirza (2012) semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi maka semakin tinggi pertumbuhan output perkapita dan meningkatnya daya beli masyarakat. Tingginya daya beli masyarakat akan meningkatkan kesejahteraan karena daya beli masyarakat merupakan salah satu indikator komposit dalam IPM yang disebut indikator pendapatan.

2) Pengaruh Tidak Langsung

Berdasarkan hasil analisis nilai z hitung sebesar $4,921 > 1,64$, ini berarti disparitas pendapatan antardaerah merupakan variabel mediasi dalam pengaruh pertumbuhan ekonomiterhadap kesejahteraan masyarakatProvinsi Bali, Pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat melalui disparitas pendapatan antardaerah adalah sebagai berikut:

$$\begin{aligned} X_1 \rightarrow X_2 \rightarrow Y &= (a \times b) \\ &= (-0,924) \times (-0,668) \\ &= 0,617 \end{aligned}$$

Nilai sebesar 0,617 mempunyai arti bahwa pengaruh tidak langsung pertumbuhan ekonomi melalui disparitas pendapatan antar daerah terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 61,7%.

SIMPULAN

Disparitas pendapatan antar daerah provinsi Bali yang diukur dengan indeks williamson dalam periode 2001-2012 mengalami penurunan dengan nilai rata-rata sebesar 0,29 yang berarti disparitas tergolong dalam kriteria rendah. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap disparitas pendapatan antardaerah. Disparitas pendapatan antardaerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakatProvinsi Bali melalui disparitas pendapatan antardaerah, atau dengan kata lain disparitas pendapatan antardaerah merupakan variabel mediasi dalam pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Bali.

SARAN

Pemerintah daerah dalam kebijakan pembangunan agar memprioritaskan pemerataan dalam aspek distribusi pendapatan serta pengalokasian infrastruktur dan investasi pada setiap daerah secara merata. Pemerintah dalam programnya disamping mengejar laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, diharapkan pula mampu lebih intensif melaksanakan upaya pemerataan distribusi pendapatan serta pembangunan manusia.

REFERENSI

- Abdel-Rahman, Hesham and Ping Wang. 1996. Social Welfare and Income Inequality in a System of Cities. *Department of Economics and Finance, University of New Orleans, New Orleans*: hal. 094-119.
- Arsyad, Lincoln. 2010. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Unit Peberbit dan Percetakan STIM YKPN Yogyakarta
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPENAS). 2013. Analisis Kesenjangan Antar Wilayah 2013. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik (BPS). 2013. *Bali Dalam Angka 2013*. Provinsi Bali.
- , 2013. *Produk Domestik Regional Bruto Per Kabupaten/ Kota 2001-2012*. Provinsi Bali.
- Daryanto Arief dan Yundy Hafizrianda. 2010. *Model-model Kuantitatif untuk Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah: Konsep dan Aplikasi*. Bogor: IPB Press.
- Elizabeth A. Stanton. 2007. The Human Development Index: A History. *Working Paper Global Development and Environment Institute Tufts University*. No. 127.
- Fleisher B, Haizheng Li, dan Min Qiang Zhao. 2009. Human capital, economic growth, and regional inequality in China. *Journal of Development Economics, Department of Economics, Ohio State University, Columbus, OH 43210, United States*. No 17.
- Gallo, Cesar. 2002. Economic Growth and Income Inequality: Theoretical Background and Empirical Evidence. *Working Paper University College London*. no. 119.
- Grubel, Harbert. 1998. Economic Freedom and Human Welfare: Some Empirical Findings. *Journal of Simon Fraser University*. Vol 2: hal, 287-304.
- Hartono, Budiantoro. 2008. Analisis Ketimpangan Pembangunan Ekonomi Di Provinsi Jawa Tengah. *Tesis Program Pascasarjana Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.
- Lilis Setyowati dan Yohana Kus Suparwati. 2012. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jawa Tengah*. 9(1), h: 113-133.
- Mirza, Denni Sulistio. 2012. Pengaruh Kemiskinan, Pertumbuhan Ekonomi, dan Belanja Modal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah 2006-2009. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang, ED AJ*. Vol 1: hal, 1-15.
- Oates, W. 1993. Fiscal Decentralization and Economic Development, *National Tax Journal*. XLVI. Hal, 237-243.
- Qiao. B, Jorge M-V, and Yongsheng. 2007. The Tradeoff Between Growth and Equity in Decentralization policy: China's experience. *Journal of Development Economics, Central University of Finance and Economics, Beijing, China*. Hal, 112-128.
- Pambudi, Eko Wicaksono. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi (Studi kasus: Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah). *Skripsi Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Patta, Devyanti. 2012. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia di Sulawesi Selatan Periode 2001-2010. *Skripsi Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin, Makasar*.

- Pose, Rodriguez. 2007. Fiscal Decentralization, Efficiency and Growth. *Journal of Department Of Geography and Environmental, London School of Economics*. London.
- Prapti, Lulus. 2006. Keterkaitan Antar Pertumbuhan Ekonomi dan Distribusi Pendapatan. *Tesis Program Studi Magister Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Ranis, Gustav. 2004. Human Development and Economic Growth. *Center Discussion Paper of Yale University*. No 887.
- Rastiwa, Mahesa Eka. 2013. Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pendapatan Antar Kecamatan di Kabupaten Gianyar. *E-Jurnal EP Unud*, 2 (3), pp: 119-128.
- Santika, Lilya. 2014. Pengaruh Komponen Indeks Pembangunan Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Bali. *E-Jurnal EP Unud*, 3 (3), pp:106-114.
- Sasana, Hadi. 2009. Analisis Dampak Pertumbuhan Ekonomi, Kesenjangan Antar Daerah dan Tenaga Kerja Terserap Terhadap Kesejahteraan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Dalam Era Desentralisasi Fiskal. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE)*. Vol 1: hal, 50-69.
- Savitri, Ayu. 2008. Disparitas dan Konvergensi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi dan Sosial, INPUT*. Vol 1: hal, 38-48.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Padang: Baduose Media.
- Sukirno, Sadono. 2006. *Makroekonomi. Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tabassum, Amina. 2004. Economic Growth and Income Inequality Relationship: Role of Credit Market Imperfection. *Journal Department of Economics, Quaid-i-Azam University*. Islamabad.
- Todaro, Michael P. 2009. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Thornton, John. 2006. Fiscal Decentralization and Economic Growth Reconsidered. *Journal of Urban Economics (Fiscal Affairs Department, International Monetary Fund, NW, Washington DC, USA)*. Vol 6: hal, 64-70.
- Utama, Made Suyana. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Denpasar: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana.